

**SKRIPSI**

**KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BIMA DAN  
UMKM TENUN DI KELURAHAN NTOBO KOTA BIMA DALAM  
PENGEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2022**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu(S1)

Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**AYU PANCAR ANJANI**

**NIM. 218130047**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2021/2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BIMA DAN UMKM  
TENUN DI KELURAHAN NTOBO KOTA BIMA DALAM  
PENGEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2022**

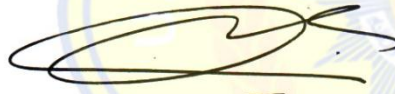
Disusun dan diajukan oleh :

**AYU PANCAR ANJANI**  
Nim. 218130047

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Mataram, 4 Juli 2022

**Pembimbing I**



**Drs. H. Darmansyah, M.Si.**  
NIDN: 0008075914

**Pembimbing II**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.**  
NIDN : 0809038902

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.**  
NIDN: 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Kolaborasi Antara Pemerintah Kota Bima Dan UMKM Tenun Di Kelurahan  
Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi Tahun 2022**

Oleh :

**AYU PANCAR ANJANI**

Nim. 218130047

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 06 Juli 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim penguji,


**Drs. H. Darmansyah, M.Si**

NIDN. 0008075914

(PU) 


**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**

NIDN. 0817119102

(PP) 

**Drs. Amil, M.M**

NIDN. 0831126204

(PN) 

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.**

NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi saya yang berjudul  
“ **KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BIMA DAN UMKM TENUN DI KELURAHAN NTOBO KOTA BIMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2022** ” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 26 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan



**AYU PANCAR ANJANI**  
Nim. 218130047



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Pancar Anjani  
NIM : 218130047  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 17 Juni 2000  
Program Studi : Ilmu pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 082236811263  
Email : ayupancar223@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BIMA DAN  
UMKM TENUN DI KELURAHAN MTOBO KOTA BIMA  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2022.

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 24 Agustus 2022

Penulis



Ayu Pancar Anjani  
NIM. 218130047

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Pancar Anjani  
 NIM : 218130047  
 Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 17 Juni 2000  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp/Email : 082236811263 / ayupancar222@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BIMA DAN UMKM TERUTU  
DI KELURAHAN HUTOBO KOTA BIMA DALAM PENGEMBANGAN  
EKOTONI TAHUN 2022.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Agustus 2022  
 Penulis



Ayu Pancar Anjani  
 NIM. 218130047

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa**

**( Ridwan Kamil )**

**Teruslah bekerja keras walaupun pernah mengecewakan tetapi jangan pernah patah semangat**

**( Ayu Pancar Anjani )**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta (Suparjan), dan Ibunda tersayang (Eni Sucia Ningsih), yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Adik tersayang (Fadia) dan (Fauzan) yang selalu memberikan motifasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Untuk Sehabatku ( Titin, Nihla, Eka, Milla, Bulqis, Anggi, Fauzul ) yang selalu memberikan motifasi semangat dan dukungan dalam membantu penelitian baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik penelitian sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi)
4. Untuk kekasih hati Fitrah Ramadhan yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memeberikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Teman-Teman Se angkatan, terutama kelas Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan skripsi ini dan segala kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Kolaborasi Antara Pemerintah Kota Bima Dan UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi Tahun 2022**” tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik umumnya dan khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Kedua Orang Tua Saya Tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 01 Juli 2022

Penulis,

**AYU PANCAR ANJANI**

**Nim. 218130047**

**Kolaborasi Antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun di Kelurahan  
Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi Tahun 2022**

**Oleh :**

**Ayu Pancar Anjani**

**ABSTRAK**

Dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan Ntobo Kota Bima memanfaatkan keterampilan menenun yang dimiliki sebagai wadah dalam mencari sumber pendapatan salah satunya yaitu dengan membuka peluang usaha melalui UMKM Tenun. Pemerintah Kota Bima melibatkan secara langsung peranaannya bersama dengan pelaku UMKM dalam upaya pengembangan UMKM Tenun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kota Bima dan para pelaku usaha UMKM Tenun Ntobo dalam peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan memperoleh data-data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah menggunakan *purpove sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja karena sudah menentukan sumber informan sesuai keinginan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kolaborasi bersama dengan pelaku UMKM Tenun Ntobo. Hal ini dibuktikan dengan respon pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah menjalankan perannya sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi UMKM Tenun Ntobo untuk mencapai tujuan pengembangan usahanya yaitu memberikan pelaku UMKM berupa pelatihan, pendampingan, serta permodalan dalam mengembangkan suatu produk yang dihasilkan.

*Kata Kunci : Kolaborasi, UMKM, Pengembangan ekonomi.*

***Collaboration between Bima City Government and Weaving SMEs in Ntobo Village, Bima City in Economic Development in 2022***

**By :**

***Ayu Pancar Anjani***

**ABSTRACT**

*Bima City uses the weaving talents of the Ntobo village community as a forum for locating sources of revenue, one of which is opening up business prospects through SMEs Weaving to promote the community's economy. In the quest to develop MSME Weaving, the City Government of Bima actively collaborates with MSME actors. This study aims to ascertain how the local community's economy has been impacted by cooperation between the Bima municipal government and the SMEs of Ntobo Weaving. Researchers collected data using qualitative research techniques, including observation, documentation, and interviews. Purposive sampling, one of the sampling procedures used in this study, was chosen by respondents because it allowed the researcher to choose the source of the informant. According to the study, the government and SMEs in Ntobo Weaving have worked together. The government's response to forging a partnership with MSME actors proves this. To help Ntobo Weaving SMEs realize their business development goals, the Department of Cooperatives, Industry and Trade of the City of Bima has fulfilled its duty as a facilitator by giving MSME actors training, mentoring, and funding for the creation of a product.*

**Keywords:** *Collaboration, SMEs, Economic development.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.4.3 Manfaat Akademis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Collaborative Governance .....	20
2.2.2 Model Kolaborasi .....	25

2.2.3 Proses Kolaborasi .....	30
2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi <i>Collaborative Governance</i> .....	33
2.3 UMKM .....	38
2.4 Kerangka Pikir .....	41
2.5 Definisi Konseptual.....	42
2.6 Definisi Operasional.....	43
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode dan Jenis Penelitian .....	44
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Metode Penentuan Responden .....	45
3.4 Sumber Data Penelitian.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisa Data .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL</b>	
4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.2. Profil Kelurahan Ntobo .....	58
4.3. Kolaborasi Antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi Tahun 2022 .....	59
1. Kesepakatan Prosedural .....	59
2. Institusional .....	67
3. Kepemimpinan .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

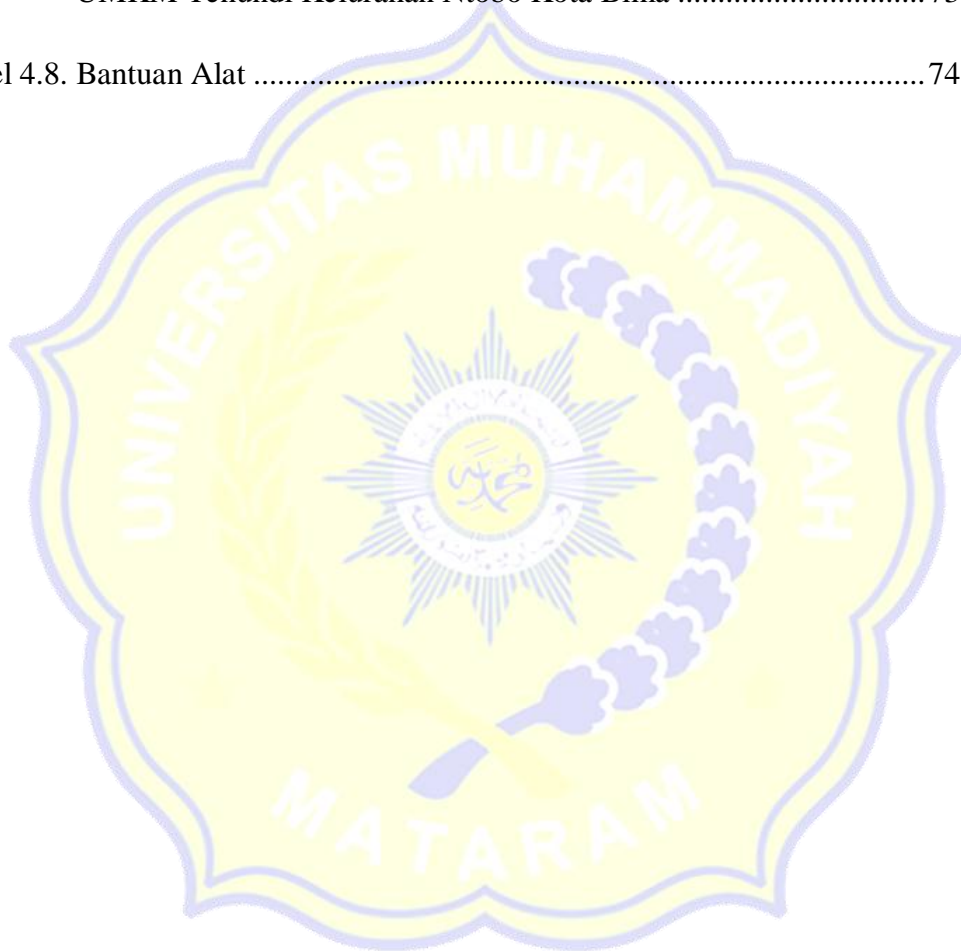
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah UMKM Tenun Kelurahan Ntobo Kota Bima Tahun 2022 .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2. Definisi Oprasional .....	43
Tabel 3.1. Narasumber .....	46
Tabel 3.2. Data Primer .....	47
Tabel 3.3. Data Sekunder .....	48
Tabel 4.1. Nama-Nama Anggota dan Posisi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.....	57
Tabel 4.2. Batas-batas Wilayah Kelurahan Ntobo .....	58
Tabel 4.3. Kegiatan Kerjasama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dan UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima .....	63
Tabel 4.4. Keikutsertaan Pelatihan Berwirausaha UMKM Tenun Kelurahan Ntobo .....	64
Tabel 4.5. Produk kain tenun terjual oleh UMKM Tenun Ntobo dalam Tahun 2017 – 2021.....	64

Tabel 4.6. Rapat Koordinasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Bima dan UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima .... 70

Tabel 4.7. Upaya Pemerintah Kota Bima Dalam Pengembangan  
UMKM Tenundi Kelurahan Ntobo Kota Bima ..... 73

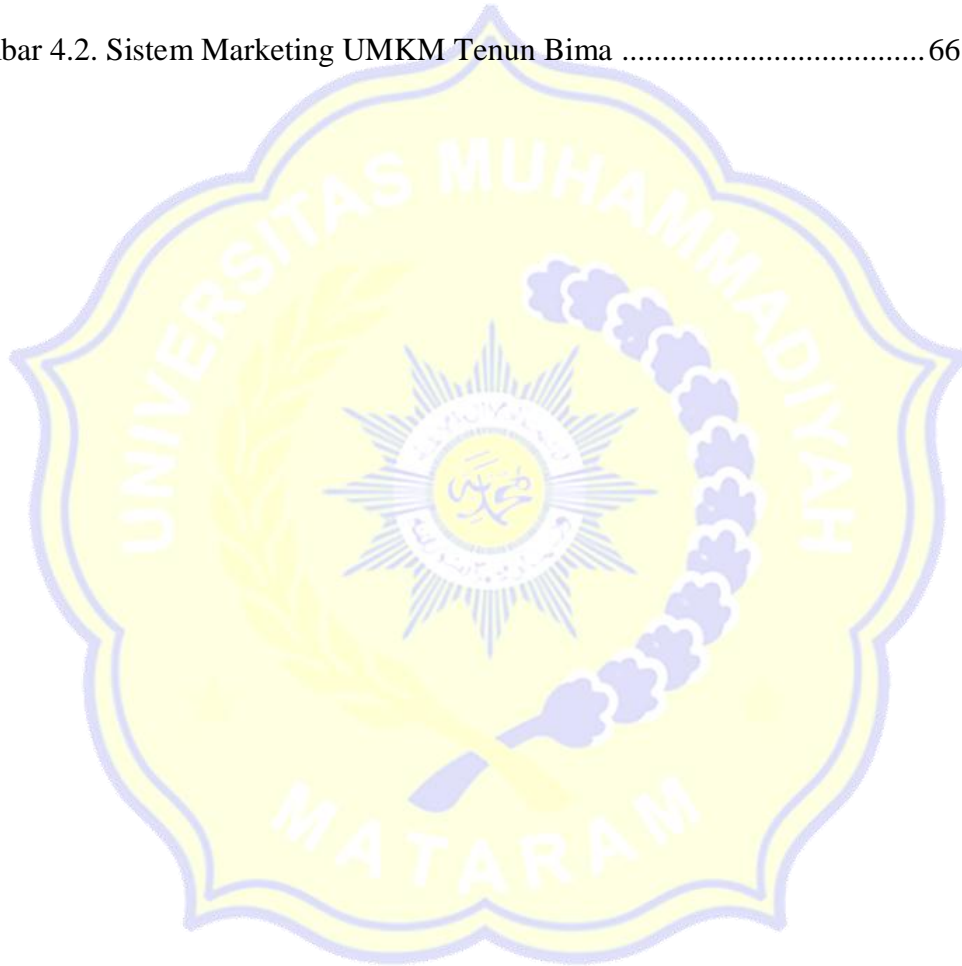
Tabel 4.8. Bantuan Alat ..... 74





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Kolaborasi.....	27
Gambar 2.2. Kerangka Pikir .....	41
Gambar 4.1. Peta Kota Bima, Provinsi NTB .....	53
Gambar 4.2. Sistem Marketing UMKM Tenun Bima .....	66



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah organisasi yang terlibat dalam berbagai bisnis yang mengambil bagian penting dalam masyarakat Indonesia, karena mereka dapat mendorong laju pembangunan moneter dan bekerja di daerah. Peran UMKM dalam pendampingan pemerintah daerah harus dilihat dari: Situasinya sebagai bagian sentral dalam latihan moneter di berbagai daerah, pemasok pekerjaan terbesar, pemain penting dalam peningkatan bisnis terdekat dan penguatan pendapatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu UMKM juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut Darwanto (2008:22), beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pembangunan, lokasi usaha kecil menengah

banyak dipedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Dalam memperluas UMKM, otoritas publik dapat membina UMKM tersebut melalui kerjasama dengan UMKM. Kerjasama adalah suatu pekerjaan dari otoritas publik untuk mengatasi masalah publik dengan bekerja sama atau bergabung dengan daerah setempat, organisasi lainnya untuk bekerja pada sifat dari proyek/latihan yang dilakukan, dalam program/latihan yang diselesaikan bersama ini dapat menyampaikan kepentingan setiap untuk tujuan bersama. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kolaborasi atau bekerjasama dengan pihak UMKM salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM.

Kelurahan Ntobo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Bima. Kelurahan Ntobo sering kali disebut sebagai kampung tenun karena Ntobo sendiri merupakan pusat pembuatan kerajinan tenunan khas Bima. Sebagian besar penduduk masyarakat kelurahan Ntobo dalam sehari-harinya melakukan kegiatan menenun sehingga tenun merupakan kegiatan bagi masyarakat setempat dalam mencari sumber pendapatan untuk kebutuhan ekonominya. Sehingga keterampilan menenun yang dimiliki ini membuat beberapa masyarakat memanfaatkannya menjadi sebuah ide bisnis atau peluang usaha seperti berwirausaha lewat kegiatan UMKM.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima Tahun 2022**

No	UMKM	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT
1.	UMKM TENUN DINA	135 Orang	KELURAHAN NTOBO
2.	UMKM TENUN MARJAN	120 Orang	KELURAHAN NTOBO
3.	UMKM TENUN NDANO NAE	115 Orang	KELURAHAN NTOBO
4.	UMKM TENUN BUSU	100 Orang	KELURAHAN NTOBO

*Sumber : data diolah peneliti 2022*

Dari data diatas menunjukkan bahwa di kelurahan Ntobo memiliki 4 (empat) jumlah UMKM tenun dengan masing-masing jumlah anggota yang berbeda pada setiap UMKM. UMKM TENUN DINA memiliki sebanyak 135 orang, UMKM TENUN MARJAN memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang, UMKM TENUN NDANO NAE memiliki jumlah anggota sebanyak 115 orang, dan UMKM TENUN BUSU memiliki jumlah anggota sebanyak 100 orang.

UMKM memegang peranan penting bagi Pemerintah Daerah Bima karena dapat memberikan potensi posisi yang terbuka. Pekerjaan UMKM merupakan bagian

utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan perbaikan pemerintahan, khususnya untuk kemajuan keuangan kelompok masyarakat Kota Ntobo. UMKM memiliki banyak keunggulan mengingat kemajuan dalam perbaikan barang, hubungan antar manusia yang erat, keberadaan UMKM membantu dalam membantu banyak buruh yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) Bidang Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menyelenggarakan kegiatan Diklat Manajemen Pemasaran Bagi UMKM Tingkat Kota Bima tanggal 19-21 Oktober 2021 . Gerakan ini diikuti oleh 35 pelaku UMKM, dengan mengikuti konvensi kesejahteraan yang dilaksanakan di Ruang Plut Kota Kota Bima. Dalam pelatihan ini peserta dilatih untuk melatih promosi lanjutan untuk produk mereka secara langsung, cara membuat kemasan atau packaging yang menarik adalah mekanisme korespondensi antara barang dan pembeli. Pelatihan Manajemen pemasaran ini bertujuan untuk menginspirasi para peserta untuk memasarkan produknya dengan teknik dan dengan cara kemasan yang menarik. Diakhir pelatihan para peserta mengharapkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat memberikan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat membantu pelaku UMKM memasarkan produknya. *(Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tanggal Kamis,21 Oktober 2021 pukul 10:00)*

Budaya khas suatu daerah yang dimiliki oleh suatu masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam mengembangkan inovasi maupun kreativitas masyarakat, khususnya tenunan khas Bima. Tenunan Bima ini merupakan budaya masyarakat Bima yang wajib dikenakan pada setiap pementasan atau festival kesenian Bima yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bima bahkan tenunan Bima merupakan salah satu fashion modern dikalangan masyarakat Kota Bima. Telah banyak ide baru dari para pengrajin tenun di Kelurahan Ntobo untuk memodernisasikan tenunan tersebut menjadi berbagai macam karya kerajinan seperti baju, tas, syal, topi, sepatu dan sebagainya. Oleh karenanya, tenunan khas Bima ini merupakan salah satu kerajinan yang dijadikan sebagai ide bisnis atau peluang usaha bagi masyarakat di Kelurahan Ntobo, usaha yang dilakukan melalui UMKM Tenun.

Mengingat begitu pentingnya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan pelaku UMKM dalam pengembangan usaha UMKM Tenun. Tetapi kerap kali UMKM menghadapi berbagai permasalahan sehingga peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sangat dibutuhkan seperti dalam hal pemberian modal, pelatihan maupun pendampingan serta kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses informasi untuk mempromosikan maupun memasarkan produk UMKM.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, akhirnya dapat ditentukan rumusan masalah yaitu “ Bagaimana Kolaborasi Antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima dalam pengembangan ekonomi Tahun 2022 “ ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam penyelenggaraan dalam penelitian, penetapan tujuan memegang peranan penting, karena tujuan merupakan alat penggerak untuk bekerja (ahli) secara berhasil, cakup, dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi di balik eksplorasi ini adalah untuk mencari tahu upaya bersama Antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi Tahun 2022.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini disusun oleh para analis untuk dapat menambah koleksi informasi dan pemahaman bagi kemajuan ilmu pemerintahan, khususnya terkait kerja sama atau kolaborasi oleh Pemerintah dan pihak UMKM. Dan juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi penulis

- 1). Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis karya ilmiah
- 2). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

##### b. Bagi Pemerintah

Eksplorasi ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan perspektif bagi otoritas publik dalam membina perekonomian melalui kawasan Bisnis, Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM).

##### c. Bagi UMKM

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi UMKM dalam meningkatkan produk dan pendapatan UMKM.

#### 1.4.3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pemeriksaan masa lalu ini merupakan salah satu acuan pencipta dalam mengarahkan eksplorasi dengan tujuan agar pencipta dapat memperbaiki hipotesis yang digunakan dalam menilai penelitian yang dihasilkan dari pemeriksaan masa lalu. Kreator tidak menemukan review dengan judul yang mirip dengan judul eksplorasi kreator. Namun, pencipta mengangkat eksplorasi masa lalu sebagai sumber perspektif dalam meningkatkan bahan ulasan dalam ujian pencipta. Berikutnya adalah ujian masa lalu sebagai beberapa acuan yang berhubungan dengan eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>1.</b>	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	Berlian Zella Dyo/ 2017
	<b>Judul</b>	<i>Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh</i>
	<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

		<p>dalam Dalam memajukan Balai Panjang Keliling barang UMKM, Pemeko Payakumbuh langsung memasukkan tugas daerah dan rahasia daerah yang memainkan perannya masing-masing dalam menghadirkan dan memamerkan Balai Panjang Keliling Barang UMKM di tingkat publik dan dunia. .</p>
	<p><b>Persamaan dan Perbedaan</b></p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang UMKM yang berfokus pada kegiatan tenun.</p> <p><b>Perbedaan :</b> penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana sistem kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima dalam hal pengembangan ekonomi.</p>

2.	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	Nia Intikaroh dan Zakariyah/ 2020
	<b>Judul</b>	<i>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan UMKM Tenun Troso Di Kabupaten Jepara</i>
	<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Tenun Troso, Pemerintah Troso telah menerapkan sistem tata kelola kolaboratif. Dalam pengelolaan tersebut Pemerintah Troso melibatkan beberapa instansi atau lembaga pemerintah maupun pihak UMKM.
	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama membahas tentang UMKM yang berfokus pada kegiatan tenun.</p> <p><b>Perbedaan:</b> penelitian ini lebih membahas tentang sistem kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima dan</p>

		UMKM Tenun Kelurahan Ntobo Kota Bima dalam pengembangan ekonomi.
3.	<b>Nama peneliti dan Tahun</b>	Ratna Trisuma Dewi/2012
	<b>Judul</b>	<i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukkan Reyog Di Kabupaten Ponorogo).</i>
	<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Rezim Ponorogo dalam memajukan usaha kecil kerajinan tangan Reyog dan Pertunjukkan Reyog sudah berjalan dengan baik karena adanya komitmen serta kepercayaan dari Pemerintah

		<p>Kabupaten Ponorogo. Dalam hal tersebut pemerintah melibatkan beberapa stakeholders serta mempermudah para pengrajin untuk mengakses informasi dalam hal Pertunjukkan Reyog dan pengembangan Kerajinan Reyog.</p>
	<p><b>Persamaan dan perbedaan</b></p>	<p><b>Persamaan :</b> sama-sama membahas tentang kolaborasi antara pemerintah dan stakeholders.</p> <p><b>Perbedaan :</b> dalam penelitian ini penulis berfokus pada kerajinan tenun, dalam hal ini Pemerintah Kota Bimaperlu mengembangkan terhadap kegiatan UMKM Tenun Kelurahan Ntobo Kota Bima dalam pengembangan ekonomi</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Nama Peneliti dan Tahun</b></p>	<p>Denok Kurniasih dkk/ 2017</p>

	<b>Judul</b>	<i>Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis (SLBM) Di Kabupaten Banyumas</i>
	<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Sterilisasi Ekologi Berbasis Daerah (SLBM) di Kabupaten Banyumas telah mencapai target pendekatan. Ketersediaan wilayah lokal untuk program dan administrasi kelembagaan sangat kuat.
	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	<b>Persamaan :</b> penelitian ini sama-sama membahas tentang collaborative governance dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan kebutuhan sosial

		<p>masyarakat.</p> <p><b>Perbedaan :</b> dalam penelitian ini fokus pembahasannya yaitu kolaborasi Pemerintah Kota Bima dalam upaya mengembangkan ekonomi melalui sektor usaha, mikro, kecil dan menengah oleh UMKM Tenun Kelurahan Ntobo Kota Bima</p>
5.	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	Christofer Ondang dkk/2019
	<b>Judul</b>	<i>Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM).</i>
	<b>Metode</b>	Kualitatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasamemiliki peran dalam

		<p>memberdayakan pelaku UMKM di Kabupaten Minahasa pemberdayaan ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan suatu pelatihan atau pembinaan bagi pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya.</p>
	<p><b>Persamaan dan Perbedaan</b></p>	<p><b>Persamaan :</b> dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pelaku UMKM.</p> <p><b>Perbedaan :</b> penelitian ini lebih berfokus kepada kolaborasi pemerintah terhadap UMKM tenun dalam usaha pengembangan ekonomi melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>

*Sumber : artikel diolah oleh peneliti*



Berlian Zella Dyo (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh sulit untuk mempromosikan produk UMKM tersebut dikarenakan keterbatasan informasi dan kesulitan untuk mengakses informasi dalam mempromosikan produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh. Pemerintah merespon untuk memajukan terutama dalam hal promosi UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh dengan menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholders yang berbeda, misalnya, Balai Panjang Keliling Rombongan Silaturahmi, Dekranasda, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Dinas Perindustrian Kota Payakumbuh, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam perkembangan Balai Panjang Belitung, yayasan-yayasan yang dimaksud di atas memiliki kemampuan atau tugasnya masing-masing termasuk memberikan jabatan dan kerangka kerja yang berbeda yang dibutuhkan agar UMKM dapat berkontribusi dan menopang perekonomian Kota Payakumbuh. Ujian yang dipimpin di Kota Payakumbuh ini menggunakan strategi pencerahan dengan kajian tulisan, pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Strategi pemeriksaan menggunakan pemeriksaan purposive. Prosedur pengumpulan informasi menggunakan rapat dan dokumentasi. Untuk menjamin legitimasi informasi, dilakukan triangulasi informasi.

Nia Intikaroh dan Zakariya (2020), dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan UMKM Tenun Troso Di Kabupaten Jepara*. Mengingat pemeriksaan yang dipimpin, cenderung beralasan bahwa Pemerintah Rezim Jepara dan Troso Berliku-liku UKM di Kabupaten Jepara belum mampu mengelola dan mengembangkan UMKM tersebut dikarenakan proses penerapan tata kelola kolaboratif belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Faktor penyebabnya lainnya yaitu Pemerintah Troso dan UKM Troso yang berliku di sekitar UKM belum memiliki pilihan untuk menyelesaikan siklus kolaborasi secara ideal sesuai dengan usaha dan elemen mendasar dari setiap organisasi. Sehingga pemerintah Kabupaten Jepara melibatkan beberapa stakeholders yaitu pihak UMKM dan beberapa instansi atau lembaga pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan UMKM Tenun Troso yang memiliki tugas dan kepentingan masing-masing seperti, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Perindustrian dan Perdagangan. Dinas (Disperindag), Pemerintah Troso dan UKM tenun Troso. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang memiliki dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

Ratna Trisuma Dewi (2012), dalam penelitiannya yang berjudul *Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukkan Reyog Di Kabupaten*

*Ponorogo*). Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Upaya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdekat dalam peningkatan usaha kecil kerajinan reyog dan pameran reyog belum berjalan dengan baik karena dimotori oleh segelintir pihak. Variabel penghambatnya adalah tidak adanya tanggung jawab dari otoritas publik, tidak adanya kepercayaan dan terbatasnya data yang didapat oleh para ahli. Penyebaran kooperatif dari komponen yang tidak dimurnikan tidak berfungsi seperti yang diharapkan, elemen penghambatnya adalah tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya kepercayaan, data terbatas tentang spesialis, dan kurangnya penyertaan mitra yang berbeda. Sehingga dalam hal ini pemerintah memberikan respon dengan melibatkan beberapa stakeholder dalam menjalin kerjasama yaitu diantaranya Bank Jatim, Yayasan Reyog, Pengrajin, Senimandan Pemasok dengan melakukan upaya kolaborasi dalam kegiatan pengembangan industri kecil kerajinan Reyog. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah investigasi kontekstual. Sumber informasi didapat dari sumber, peristiwa atau latihan yang diperhatikan, dan catatan. Metode pengujian menggunakan prosedur pemeriksaan purposive menggunakan sistem pemeriksaan bola salju. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah rapat, pertemuan, dan pengarsipan. Untuk menjamin legitimasi informasi, digunakan triangulasi informasi.

Denok Kurniasih dkk (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis (SLBM) Di Kabupaten Banyumas*. Dalam penelitiannya dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Disinfeksi Alam Berbasis Daerah (SLBM) di Kabupaten Banyumas belum memiliki opsi untuk mencapai target penataan. Tanda-tandanya adalah ketersediaan daerah terhadap program belum tersampaikan secara merata dan administrasi kelembagaan belum memaksa. Ini karena kerangka kelembagaan program tidak memiliki opsi untuk mengawasi asosiasi sosial di antara berbagai pertemuan yang disertakan. Untuk upaya penguatan kelembagaan menuju kerjasama sosial, upaya koordinasi kerjasama antara mitra yang berbeda sangat penting untuk membuat pelaksanaan program berbasis daerah lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Model penguatan kelembagaan program SLBM yang tepat adalah model kerangka kelembagaan yang dapat membangun organisasi manajerial yang sinergis dan luas antar mitra yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metodologi subyektif (Creswell, 2010) pengumpulan informasi yang dibawa keluar melalui pusat percakapan dengan mitra yang berbeda serta pertemuan atas ke bawah dengan sumber signifikan dalam program SLBM (Nearby Government), ditangani oleh Divisi Permukiman, Disinfeksi dan Penyiapan Tata Ruang, Rezim Banyumas, Kumpul-Kumpul Swadaya Masyarakat (KSM), Pekerja Proyek Pelaksana daerah peka dan pionir.

Christofer Ondang dkk (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM)*. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran dalam

memberdayakan pelaku UMKM di Kabupaten Minahasa pemberdayaan ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan suatu pelatihan atau pembinaan bagi pelaku UMKM sehingga UKM dapat mengembangkan usahanya. Penguatan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Perda Minahasa. Pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi yang jelas, menggunakan metodologi subjektif. Daerah setempat (KSM), Pekerja Proyek Pelaksana daerah peka dan perintis daerah.

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1. Collaborative Governance**

Secara epistemologis, kata joint effort berasal dari bahasa Inggris, khususnya co-work yang artinya bekerja sama. Pada abad kesembilan belas kata usaha terkoordinasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai tercipta. Asosiasi di sekitar kemudian menjadi semakin rumit. pembagian kerja bagi angkatan kerja dalam asosiasi. Rumitnya pergaulan merupakan tahap awal kerjasama di berbagai perkumpulan (Wanna, 2008: 3).

Menurut Schrage (dalam Harley dan Bisman 2010: 18), kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor, baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* adalah jenis administrasi di mana penghibur publik dan rahasia bekerja pada umumnya dalam berbagai cara, memanfaatkan siklus eksplisit, menetapkan peraturan dan pedoman untuk pengaturan produk publik. Dimana mitra publik (pemerintah) duduk bersama dengan pihak terkait (swasta dan daerah) untuk mengambil pilihan publik yang merupakan konsekuensi kesepakatan (kesepakatan bersama) melalui proses pertukaran mata ke mata.

Emerson, Nabatchi & Balogh (Emerson, et al 2012; Abbott, 2012: 17) administrasi koperasi sebagai interaksi dan desain strategi publik dan dinamika dewan yang menarik individu secara produktif melintasi batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, atau berpotensi populasi umum, swasta dan kalangan umum untuk melakukan di luar jangkauan tujuan publik.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Afful-Koomson dan Kwabena 2013:13) *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.

Menurut Ansell dan Gash (2009) dalam Sudarmo (2011: 101), Upaya terkoordinasi dapat dikenali dalam pengertian siklus dan dari perspektif standarisasi.

Pengertian kerjasama dalam pengertian siklus adalah suatu perkembangan dari siklus atau cara-cara memilah/mengawasi atau mengawasi secara kelembagaan. Dalam pengertian ini, berbagai lembaga, baik yayasan pemerintah maupun non-pemerintah dikaitkan dengan pemahaman dengan bagian dari kecenderungan dan target mereka. Sementara itu, dari perspektif pengaturan, adalah keinginan atau tujuan filosofis otoritas publik untuk menyelesaikan hubungannya dengan kaki tangan atau kaki tangan.

Grey (dalam Fendt 2010:19), yang menyatakan bahwa upaya terkoordinasi adalah siklus di mana ada perhatian dari kelompok yang berbeda yang memiliki batasan dalam melihat suatu masalah dan kemudian mencoba untuk menyelidiki perbedaan ini untuk melacak pengaturan.

Menurut Agranoff & McGuire (Chang, 2009:76-77) *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada upaya bersama yang disengaja dan hubungan tingkat antara anggota multi-sektoral, karena permintaan klien sering melewati batas dan pekerjaan dari asosiasi publik yang soliter, dan membutuhkan komunikasi di antara berbagai asosiasi yang terlibat tanpa henti dengan publik latihan. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat yang muncul dari para eksekutif lintas batas pemerintahan, otoritatif, dan sektoral.

Gagasan ini menonjolkan hubungan upaya bersama yang disengaja dan datar, sementara sebenarnya upaya bersama dibingkai oleh fakta bahwa mereka saling mendukung dan melengkapi dalam mengawasi isu-isu publik. Selain itu, dalam tulisan ini, kerjasama dalam beberapa latihan secara umum akan disatukan.

Menurut Tang & Masmanian (2008 : 5) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai ide yang menggambarkan metode yang terlibat dengan meletakkan, mengemudi, bekerja dengan, bekerja dan memeriksa rencana permainan hirarkis lintas sektoral untuk mengatasi strategi publik memberikan yang hanya dapat dengan upaya yang signifikan ditangani oleh asosiasi soliter atau area publik saja. Rencana permainan ini dijelaskan oleh upaya bersama, asumsi bersama, dan kerja sama yang disengaja antara elemen independen yang berwenang, dari setidaknya dua bidang - publik, untuk manfaat dan non-manfaat - untuk meningkatkan (memperluas) kredit dan aset yang unik

Fosler (dalam Dwiyanto 2015:253) mengemukakan kerjasama kolaboratif adalah kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif atau berkesinambungan, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan aligment atau penyatuan tujuan, strategi, agenda, sumberdaya, dan aktivitas. Dua institusi yang pada mulanya memiliki tujuan yang berbeda membangun shared vision atau visi yang sama dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama.

Menurut (Gray & Wood, dalam Dwiyanto 2015:253) kerjasama kolaboratif adalah Partisipasi kooperatif antara asosiasi terbuka dan yayasan non-legislatif



memiliki beberapa kualitas: partisipasi yang disengaja, masing-masing pihak memiliki posisi yang setara, masing-masing pihak juga memiliki independensi dan kemampuan untuk mengejar pilihan secara bebas meskipun mereka setuju untuk tunduk berdasarkan pemahaman bersama. , dan pihak-pihak yang bekerja sama memiliki tujuan terobosan atau sangat ingin meningkatkan batas fundamental dengan menggabungkan aset yang dibatasi oleh masing-masing pihak.

Menurut (Bovaird, dalam Dwiyanto 2015:263) Partisipasi antara otoritas publik dan daerah rahasia dapat dibuat dalam hal perjanjian tidak tergantung pada pertukaran perdagangan, tetapi melalui hubungan (sosial) berdasarkan kepercayaan.

Kontrak yang bersifat relational dan berjangka panjang, kerjasama yang kolaboratif dapat dikembangkan dan masing-masing pihak menjalin kerjasama yang lebih intensif sehingga kebutuhan untuk melakukan pengawasan yang ketat tidak lagi diperlukan.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Subarsono 2016:175) standar dasar dalam melaksanakan *collaborative governance* adalah bahwa ada standar penting dalam menerapkan gagasan *collaborative governance* termasuk kontribusi dari penghibur yang berbeda di luar otoritas publik / negara, kesepakatan terletak, dan konsultasi dalam siklus dinamis agregat, dan rencana untuk mengungkapkan atau melaksanakan keluar strategi dan proyek publik.

Konsep collaborative governance merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan banyak sektor di luar pemerintah. Setiap pihak harus tunduk pada kesepakatan bersama. Namun demikian, setiap pihak tetap memiliki kekuasaan atau kewenangan yang setara tanpa adanya hierarki kekuasaan terhadap organisasi lain. Melakukan musyawarah atau diskusi dalam mengambil keputusan yang mana semua pihak memiliki kedudukan yang sama.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Subarsono 2016:175) yang menyebutkan ada 5 tahapan yang harus dilalui agar suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kolaborasi. Lima tahap dalam mewujudkan *collaborative governance* tersebut yaitu *face to face dialog*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcome*.

“Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kolaborasi bila telah memenuhi lima tahapan yaitu: adanya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, proses dalam mencapai komitmen, pemahaman terhadap keputusan bersama, dan memperoleh hasil sementara”.

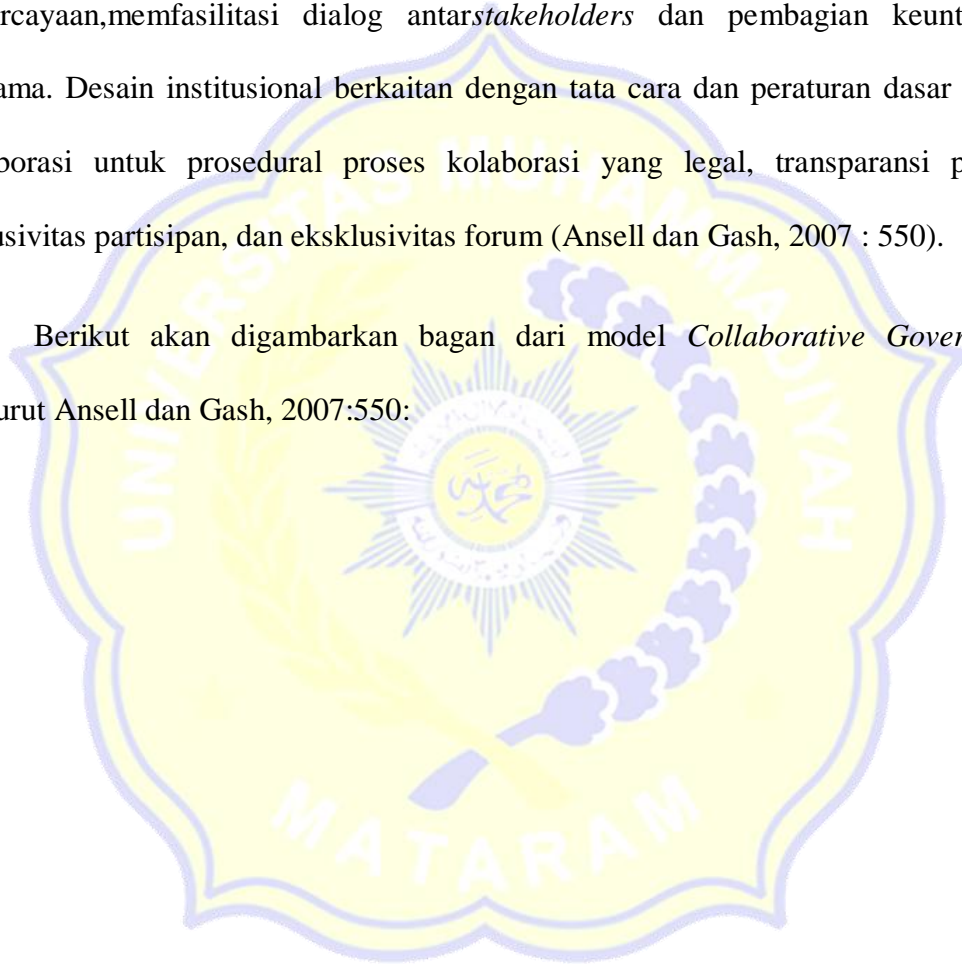
### **2.2.2. Model Kolaborasi**

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash 2007 yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan

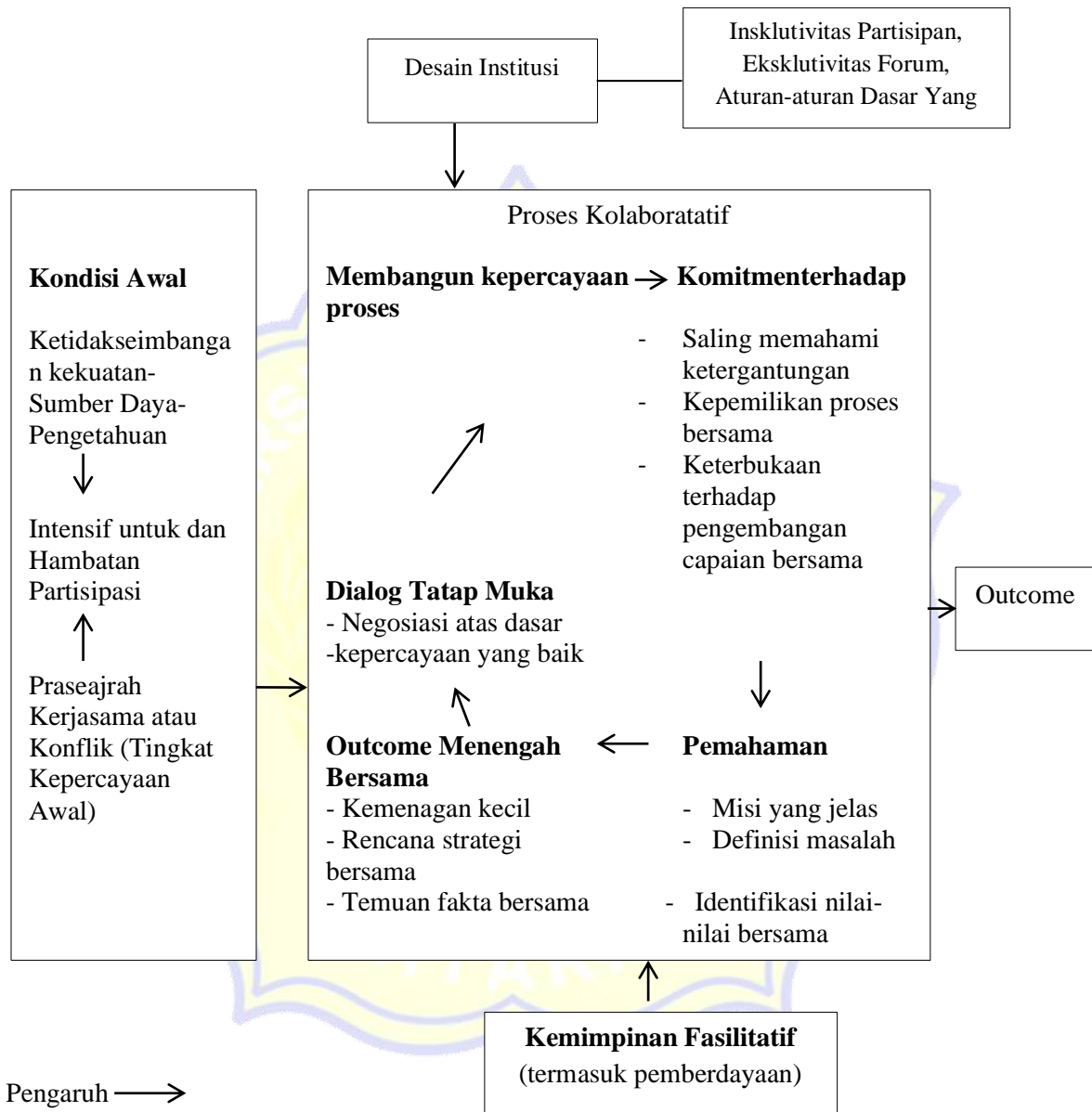
masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama. Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum (Ansell dan Gash, 2007 : 550).

Berikut akan digambarkan bagan dari model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash, 2007:550:



**Bagan 2.1.**  
**Model Collaborative Governance Ansell dan Gash**



Sumber : Ansell & Gash, 2007 : 550

Proses kolaboratif ini merupakan variabel yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Tanda-tanda kemajuan dalam proses administrasi koperasi meliputi semua; langsung dan penuh perhatian; menarik dan adil; menjamin hukum dan ketertiban; menjamin bahwa kebutuhan politik, sosial dan keuangan bergantung pada kesepakatan daerah; dan fokus pada yang tidak berdaya dalam navigasi. (UNDP dalam TIM DPAK Dikti, 2005).

Menurut Ansell dan Gash (dalam Fawwaz, 2017). Model *Collaborative Governance* memiliki empat variabel luas yaitu:

1. Kondisi awal

Keadaan yang mendasari dalam upaya terkoordinasi dipengaruhi oleh beberapa keanehan, khususnya mitra memiliki minat dan visi yang khas untuk dicapai, latar belakang sejarah partisipasi masa lalu, perhatian bersama untuk

kolaborasi saat ini, kepercayaan setiap mitra, ketidakratahan kekuatan, aset, dan informasi.

## 2. Desain Kelembagaan

Pemimpin mendekati mitra untuk berpartisipasi dengan niat jujur, berurusan dan menyelidiki, membagi perbedaan, dan mendapatkan pandangan bersama. Administrasi Koperasi sebagai kesepakatan terletak namun menunjukkan bahwa kesepakatan tidak dicapai sepanjang waktu. Persoalannya di sini adalah apakah semua koperasi harus meminta persetujuan. Masalah rencana kelembagaan dengan pemanfaatan cutoff time yang lemah adalah bahwa gagasan berkelanjutan tentang upaya bersama secara tak terduga mengurangi motivasi untuk kerja sama jangka panjang. Rencana Kelembagaan menghubungkan dengan metodologi dan standar dasar dalam upaya bersama untuk proses kerjasama yang sah secara prosedural, keterusterangan proses, inklusivitas anggota, dan pembatasan pengumpulan.

## 3. Kepemimpinan

Administrasi penting untuk merangkul, memungkinkan dan terhubung dengan mitra dan mempersiapkan upaya terkoordinasi yang efektif. Perjuangan yang tinggi dan kepercayaan yang rendah memiliki motivator untuk ikut serta, sehingga administrasi koperasi dapat dilanjutkan dengan administrasi perantara antara mitra yang mendapatkan administrasi. Aksesibilitas perintis pada umumnya akan bergantung pada kondisi sekitar. Potensi konsekuensi dari upaya bersama yang memaksa mungkin terhambat oleh tidak adanya inisiatif. Administrasi fasilitatif

berhubungan dengan konsultasi yang dipimpin oleh mitra, menetapkan prosedur standar yang jelas, membangun kepercayaan, bekerja dengan wacana di antara mitra dan berbagi keuntungan bersama.

#### 4. Proses Kolaboratif

Siklus kooperatif ini merupakan variabel yang signifikan, dimana interaksi kooperatif dimulai dengan pertukaran mata yang dihubungkan dengan kepercayaan yang besar, selanjutnya dengan adanya wacana tatap muka yang baik akan terbentuk kepercayaan yang akan mempengaruhi tanggung jawab dalam proses usaha bersama, setelah tanggung jawab mitra tinggi. akan ada pemahaman yang khas dalam perincian masalah, bukti nilai yang membedakan, dan misi yang masuk akal. Setelah mitra memiliki kesamaan dan pemahaman, itu akan memutuskan tindakan ahli untuk menyelesaikan upaya bersama.

#### 2.2.3. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang dimaksud adalah *Collaborative Governance* yang dicirikan sebagai siklus dan desain dalam navigasi strategi terbuka dan papan yang menarik secara lokal berguna dalam batas-batas yayasan publik, tingkat pemerintahan serta masyarakat, area rahasia dan masyarakat umum untuk menyelesaikan kepentingan publik yang tidak dapat dicapai tanpa kontribusi dari area rahasia dan Publik (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2011:2)

Jalannya upaya terkoordinasi dilakukan dalam beberapa fase. Suatu fase model kerjasama menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai suatu teknik dalam

bagian administrasi suatu usaha publik. Meskipun siklus kooperatif sulit dilakukan dengan alasan bahwa kepribadian setiap pasangan tidak sama satu sama lain.

Menurut Ansell dan Grash (2007:558-561) proses *Collaborative Governances* sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)

Semua jenis administrasi koperasi bekerja dari mata ke mata pertukaran langsung dari setiap mitra termasuk. Seperti siklus administrasi koperasi, wacana langsung sangat penting untuk mengenali pintu terbuka yang berharga dan manfaat bersama. Wacana dari dekat dan pribadi bukan sekadar diskusi sepintas. Pertukaran langsung ini dapat membatasi ancaman dan ketidaksopanan dari mitra yang bersangkutan. Jadi mitra dapat bekerja sama sesuai tujuan dan keuntungan bersama.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Sayangnya kepercayaan antara mitra adalah sesuatu yang khas menuju awal dari proses usaha bersama. Kerjasama bukan hanya tentang pertukaran antar mitra, tetapi lebih dari itu adalah pekerjaan untuk membangun kepercayaan bersama satu sama lain. Membangun kepercayaan harus segera diselesaikan ketika proses upaya terkoordinasi utama dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mitra tidak mengalami egosentrisme antar instansi. Selanjutnya, dalam membangun kepercayaan ini dibutuhkan pionir yang dapat memahami arti penting kerjasama.



c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Tanggung jawab pasti memiliki area kekuatan yang serius untuk proses upaya yang terkoordinasi. Tanggung jawab adalah inspirasi untuk menjangkau atau mengambil bagian dalam Administrasi Koperasi. Tanggung jawab yang solid dari masing-masing mitra diharapkan untuk menjaga pertaruhan dari proses upaya yang terkoordinasi. Terlepas dari kenyataan bahwa tanggung jawab pasti sesuatu yang kacau dalam upaya terkoordinasi. Tanggung jawab adalah kewajiban mitra untuk melihat hubungan sebagai kebutuhan yang mungkin timbul untuk diciptakan.

d. Sikap Saling Membantu (*Share understanding*)

Pada titik yang sama dalam siklus kerjasama, para mitra yang terlibat harus berbagi pemahaman tentang apa yang dapat mereka capai melalui upaya terkoordinasi. Pemahaman bersama ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, target normal, visi bersama, filosofi normal, dll. Pemahaman bersama dapat memiliki saran untuk persetujuan bersama untuk menguraikan masalah tanpa henti.

e. Hasil Sementara (*Intermediate outcomes*)

Dilanjutkan dengan efek samping dari proses upaya terkoordinasi muncul sebagai hasil yang substansial. Inilah konsekuensi dari siklus dasar dan fundamental dalam membina kekuatan yang dapat mengarahkan kemajuan suatu usaha yang terkoordinasi. Hasil tengah ini muncul ketika tujuan potensial dan keuntungan dari

upaya terkoordinasi cukup konkret dan ketika sedikit kemenangan dari kerjasama dapat dibayangkan.

#### 2.2.4. Faktor Yang Mempengaruhi *Collaborative Governance*

Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018) menyatakan bahwasuksesnya kolaborasi merupakan kemampuan bertindak secara kolektif. Yang menggambarkan kerangka kolaborasi sebagai bagian yang krusial dan dinamika kolaborasi dan membutuhkan dukungan secara berkelanjutan dari berbagai aktor dalam *collaborative governance*. Kemampuan bersama ini meliputi kesepakatan procedural, institusional, pengetahuan sumber daya manusia dan kepemimpinan.

- a. **Kesepakatan procedural**, adalah jenis dampak sosial yang memasukkan tuntutan langsung yang dimulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya. Para pelaku kesepakatan adalah pembujuk yang luar biasa karena mereka dapat membuat orang lain yang ditunjuk menyatakan ya atas pengaturan yang diajukan oleh para pelaku kesepakatan, termasuk pelobi politik, pembuat undang-undang, arbiter yang cakap, dan lain-lain.
- b. **Institusional**, dapat mempengaruhi usaha bersama dengan asumsi individu-individu yang terlibat erat berkoordinasi secara lugas dan mengakui setiap keinginan daerah terhadap awal kerjasama sampai proses usaha bersama berjalan.
- c. **Pengetahuan sumber daya manusia**, sangat persuasif dalam proses usaha bersama dengan alasan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan

kerjasama harus mendominasi bidang-bidang kewajiban terbesar sehingga upaya yang terkoordinasi dapat berjalan secara ideal.

- d. **Kepemimpinan**, Menjadi perhatian utama dalam kerjasama sejak pelopor berubah menjadi pengontrol, pemrakarsa dalam membuat hak, mengatur jalannya usaha yang terkoordinasi.

Freeman dalam (Ansell dan Gash, 2007) menyatakan bahwa *parastakeholder* harus terlibat dalam segala tahapan proses pembuatan keputusan, walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi *semuastakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan karena tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan *antarastakeholders*. Jadi kesepakatan adalah faktor penting yang mempengaruhi *collaborative governance*.

Menurut Donahue dalam (Sudarmo, 2011) yang memberikan tiga aspek dalam memulai inisiatif *collaborative governance* antara lain sebagai berikut :

- a. Inisiatif pasti bermula dari pemain atau pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar.
- b. Masing- masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan- tujuan kolaborasi
- c. Hubungan diantara institusi- institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya setiap intitusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara

transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut.

Dalam kolaborasi tentu ada beberapa hal yang menghambat kolaborasi, faktor yang menghambat kolaborasi *collaborative governance*. Diantaranya yaitu :

#### **a. Budaya**

Unsur-unsur sosial (budaya) harus terlihat bahwa kerjasama bisa jatuh datar karena kecenderungan budaya ketergantungan pada pembuat dan tidak berpikir sejenak untuk mengambil lompatan ke depan dan bahaya. Untuk membuat kerjasama yang menarik membutuhkan pejabat lokal untuk memiliki apa yang diperlukan dan keinginan untuk berbaur ke dalam organisasi dengan cara yang seimbang, yang berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, ketergantungan pada teknik dan tidak mempertimbangkan menghadapi tantangan adalah salah satu hambatan untuk pelaksanaan yang kuat dari upaya terkoordinasi. (Government of Canada 2008; Sudarmo, 2011: 117).

Kaner (dalam Sander Wright, 2006), menggaris bawahi bahwa pelaksana, perintis dan fasilitator harus menunjukkan janji untuk menguasai dan merangkul kemampuan kooperatif, misalnya, perhatian penuh, menjamin bahwa semua anggota didengar dan diperlakukan secara wajar, membedakan dan menguji kecurigaan, bertindak dan memberikan dengan tulus dan gigih menggerakkan pertemuan di kecepatan yang menjamin komprehensif.

Disamping itu, kegagalan kolaborasi juga karena masih dipertahankannya pendekatan “*top down*” oleh pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi (Government of Canada 2008; Sudarmo, 2011: 118).

Kolaborasi bisa gagal dikarenakan partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya dipandang tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan atau pihak pemerintah melalui pendekatan *top down* (Sudarmo, 2011: 118).

O’Brien (2012) menegaskan bahwa dalam suatu proses kolaboratif, para peserta harus saling bergantung satu sama lain sehingga agar tindakan yang satu efektif, mereka harus bergantung pada tindakan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari sebuah kolaborasi dari kegagalan, pemerintah harus mampu menjauhkan pendekatan *top down* dalam sebuah kolaborasi.

#### **b. Intitusi-intitusi**

Sehubungan dengan faktor-faktor, upaya terkoordinasi dapat gagal karena kecenderungan kantor yang terkait dengan kerja sama atau upaya terkoordinasi, terutama dari otoritas publik untuk secara umum akan menerapkan konstruksi progresif pada fondasi yang berbeda yang masih terlalu berat untuk mengambil struktur ke atas, Dengan cara ini tanggung jawab kelembagaan dan bantalan strategi juga bersifat vertikal, tidak layak untuk upaya terkoordinasi karena upaya bersama

daerah dalam pendekatan untuk bekerja atau memilah pada bidang yang setara antara pemerintah dan non-pemerintah..

Hambatan terhadap upaya terkoordinasi dalam struktur ke atas ini adalah sifat batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat ditekuk yang ditetapkan oleh otoritas publik. Sering terjadi bahwa dalam asosiasi pemerintah, rencana dan dorongan dibatasi oleh asumsi, metode, aksesibilitas, dan aset yang berlimpah dan duplikatif, sehingga sulit untuk membayangkan mengadakan segala jenis upaya bersama dengan penghibur di luar asosiasi untuk memperoleh pemahaman yang khas. (Government of Canada, 2008; Sudarmo, 2011: 119).

Hal ini kemudian harus dilihat sebagai siklus kooperatif sehingga hubungan antara mitra dapat bahkan untuk menyelesaikan pilihan bersama secara bersama-sama.

### **c. Politik**

Terkait dengan faktor kepentingan pemerintah erat kaitannya dengan faktor politik kepentingan diantara masing-masing pemangku kepentingan. Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain (Sudarmo, 2011: 120).

Fisher & Ury (dalam O'Brien, 2012) membingkai upaya yang menyoroti kepentingan pemegang saham atau tumpang tindih pemangku kepentingan sangat berharga, karena kesepakatan dan kerjasama lebih mudah dicapai ketika diskusi mengeksplorasi minat dan hasil umum peserta daripada posisi atau spesifik program mereka.

Perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menghambat proses kolaborasi tersebut (Sudarmo, 2011: 120).

Oleh karena itu, penting untuk dapat membingkai agenda dan mengundang parapeserta secara strategis, para pemimpin inisiatif kolaboratif dapat mempromosikan legitimasi, keadilan, dan transparansi melalui beberapa langkah yang membentuk dinamika di antara para peserta.

### **2.3. UMKM**

UMKM merupakan kegiatan usaha skala terbatas yang mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah tulang punggung untuk mempercepat pemulihan moneter untuk memenuhi kebutuhan program dan peningkatan berbagai bidang dan kemungkinan serta untuk meningkatkan upaya penguatan wilayah yang berbeda. ekonomi publik. Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) menjadi perbincangan yang layak untuk penciptaan lapangan kerja yang diatur oleh otoritas publik, kawasan rahasia dan pelaku bisnis perorangan.

UMKM merupakan badan usaha perorangan yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan, pembentukan produk nasional serta perluasan kesempatan kerja. Wujud kehidupan ekonomi di Indonesia karena usaha kecil. Sehingga UMKM ini tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. (Ii & Umkm, 2008)

Dalam menumbuh dan mengembangkan perekonomian nasional diperlukan peranan industri kecil dan menengah sesuai yang ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kegiatan usaha kecil menengah (UMKM) adalah salah satu cara agar barang-barang imajinatif lokal dapat dirasakan dan membuka pintu bisnis yang berharga bagi para pelaku bisnis di kabupaten tersebut. Demikian pula, usaha kecil, menengah (UMKM) dipandang penting untuk meningkatkan gaji per kapita dan bekerja pada perekonomian suatu kabupaten, sehingga usaha kecil, kecil dan menengah (UMKM)



diharapkan memiliki pilihan untuk mengambil bagian. dalam memajukan perekonomian bangsa.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang menghasilkan tenaga kerja dan produk dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat murni dengan menggunakan aset biasa, hadiah dan karya tradisional dari lingkungan. Ciri-ciri UMKM adalah komponen yang tidak dimurnikan tidak sulit didapat, memanfaatkan inovasi yang lugas sehingga tidak sulit untuk memindahkan inovasi, sebagian besar kemampuan dasar telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya, terkonsentrasi pada pekerjaan atau mempertahankan jumlah yang sangat banyak. Dari tenaga kerja, potensi pasar yang terbuka pintunya cukup luas, sebagian besar barang mereka terjerat dalam bisnis. sektor bisnis lokal atau lokal dan beberapa tidak tutup, yang lain dapat diperdagangkan, produk tertentu memiliki kualitas yang terkait dengan ekspresi lingkungan dan pekerjaan sosial dan termasuk wilayah lokal yang tidak berdaya secara finansial dan produktif.

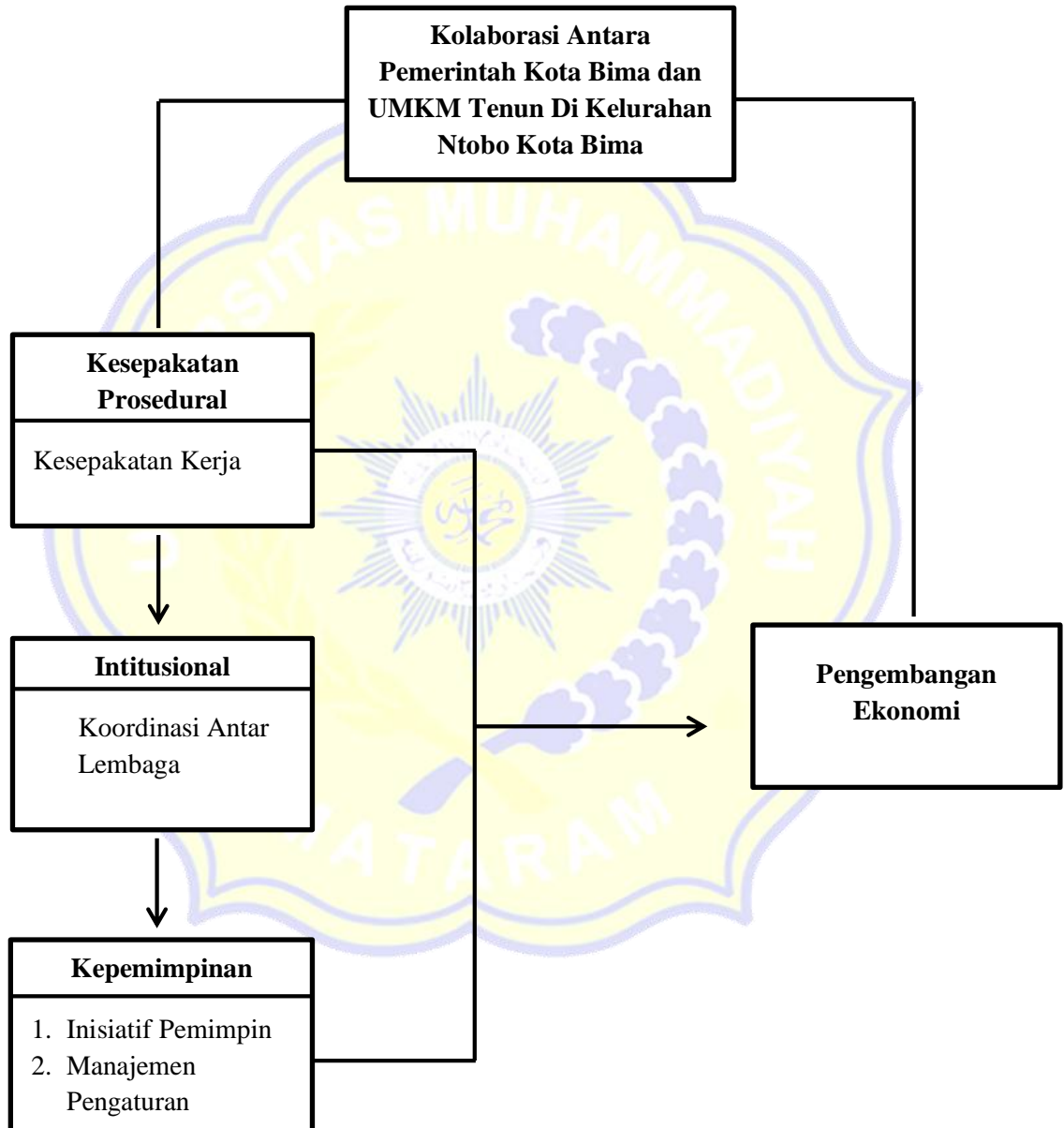
Dalam perkembangan UMKM pun tidak lepas dari peran pemerintah, Dalam memberdayakan pelaku UMKM Pemerintah memiliki peran yaitu sebagai pemberian akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, penyedia sarana dan prasarana, memberikan pembinaan, memudahkan para pelaku UMKM untuk mengakses informasi dalam memasarkan atau mempromosikan usahanya, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha umkm ini dapat meningkat dalam mengelola usahanya.

Pearson *dalam* Prasetyo (2015) mengemukakan. Gagasan penguatan menekankan bahwa individu memperoleh kemampuan, informasi, dan kemampuan yang memadai untuk memengaruhi rutinitas harian mereka dan keberadaan orang lain yang mereka sayangi.



## 2.4. Kerangka Pikir

**Bagan 2.2.**  
**Kerangka Pikir**



*Sumber : Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018)*

## 2.5. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konsep adalah sebuah atraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal khusus dan dapat ditemukan di kamus (dictionary definition). Adapun Konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Emerson dan Nabatchi ( dalam Ulfa, 2018) Yang menggambarkan kerangka kolaborasi sebagai bagian yang krusial dan dinamika kolaborasi dan membutuhkan dukungan secara berkelanjutan dari berbagai actor dalam collaborative governance, antara lain :

1. Kesepakatan Prosedural, adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari satu pihak ke pihak yang lain.
2. Intistusional, yaitu bisa mempengaruhi kolaborasi apabila pihak yang berkepentingan melakukan koordinasi secara terbuka dan menerima segala aspirasi masyarakat di awal kolaborasi sampai proses kolaborasi berjalan.
3. Kepemimpinan, menjadi hal central dalam kolaborasi karena pemimpinlah yang menjadi pengatur, inisiator dalam mengelola, mengatur jalannya kolaborasi.

## 2.6. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah aspek-aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain :

**Tabel 2.2.**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator
1	<b>Kesepakatan Prosedural</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesepakatan Kerja</li></ul>
2	<b>Institusional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi Antar Lembaga</li></ul>
3	<b>Kepemimpinan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inisiatif Pemimpin</li><li>• Manajemen Pengaturan</li></ul>

*Sumber : diolah peneliti 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode dan Jenis Penelitian**

Jenis eksplorasi yang dilakukan oleh para ahli dalam penelitian ini menggunakan teknik subyektif, strategi subyektif ini sering disebut strategi pemeriksaan naturalistik karena eksplorasi dilakukan dalam keadaan biasa, juga disebut teknik etnografi karena Pada mulanya strategi ini digunakan secara lebih luas untuk penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial manusia yang disebut teknik subjektif. karena informasi yang dikumpulkan dan pemeriksaan lebih bersifat subjektif (Sugiyono, 2015 1-2)

Metodologi subyektif mendapatkan pemahaman yang mendalam dan terjemahan dari kepentingan, realitas dan realitas signifikan. Untuk situasi ini, untuk merekomendasikan bahwa eksplorasi subjektif antara lain berbeda, informasi yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka. (Moleong, 2012)

Metode deskriptif dicirikan sebagai metode berpikir kritis yang dieksplorasi dengan menggambarkan atau menggambarkan kondisi subjek/objek eksplorasi (individu, yayasan, daerah setempat dan lain-lain). Sampai sekarang dan upaya selanjutnya untuk memberikan penyelidikan. Kualitas keseluruhan dari teknik ilustratif adalah memusatkan perhatian pada isu-isu yang ada pada saat eksplorasi

atau isu-isu asli, serta menggambarkan realitas saat ini tentang masalah yang sedang diteliti sebagaimana adanya, disertai dengan terjemahan yang waras. (Widi,2010:84).

Penjelasan analisis menggunakan strategi elucidating subjektif adalah dengan alasan bahwa masalah yang terkonsentrasi dalam penelitian ini adalah tentang. Kolaborasi Pemerintah Kota Bima Dan UMKM Tenun Di Kelurahan Ntobo Kota Bima Dalam Pengembangan Ekonomi.

### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima dan Lokasi UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kec. Raba, Kota Bima. Waktu Penelitian telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

### **3.3. Metode Penentuan Responden**

Dalam pemeriksaan responden dalam tinjauan ini, menggunakan purposive testing, yaitu suatu prosedur pemeriksaan yang bertujuan, menyiratkan bahwa metode pemilihan sumber adalah sesuai dengan keinginan ilmuwan karena ia pasti mengenal daerah tempat atau daerah yang telah dimanfaatkan. sebagai objek eksplorasi terhadap sebagian saksi sebagai berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Narasumber Penelitian**

No	INFORMAN	JUMLAH	LOKASI
1.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1	Kota Bima
2.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	1	Kota Bima
3.	Masyarakat Pelaku UMKM Tenun	10	Kelurahan NtoboKota Bima
	Total	12	

*Sumber data : di olah peneliti 2022*

### **3.4. Sumber Data Penelitian**

Aturan dalam pemeriksaan subjektif adalah informasi yang pasti bahwa informasi yang benar adalah segala sesuatu yang dipertimbangkan, bukan informasi yang hanya tampak, diucapkan, tetapi informasi yang mengandung kepentingan di balik apa yang dilihat dan diucapkan. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian adalah informasi penelitian yang diperoleh melalui dua sumber informasi (Sugiyono, 2013:2)

#### **3.4.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui



wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010 : 157)

**Tabel 3.2.**  
**Unit Analisa Data Primer**

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	<b>Kesepakatan Prosedural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan kerja/MOU dengan Pemda Kota Bima</li> <li>• Kapan, siapa yang terlibat, bagaimana kesepakatan dibuat</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku UMKM Tenun
2	<b>Institusional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Antar Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana koordinasi antar lembaga</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku UMKM Tenun
3	<b>Kepemimpinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif Pemimpin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa inisiatif pemimpin dari masing-masing lembaga dalam melaksanakan kerjasama</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku

				UMKM Tenun
--	--	--	--	------------

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Sumber data yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan surat kabar yang terkait dengan materi, komisi informasi, keterbukaan informasi, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

**Tabel 3.3.**  
**Unit Analisa Data Sekunder**

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	<b>Kesepakatan Prosedural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU</li> <li>• Dokumen Kerjasama</li> <li>• Dokumen perencanaan</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku UMKM Tenun
2	<b>Institusional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Antar Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil koordinasi</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan

				Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku UMKM Tenun
3	<b>Kepemimpinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif Pemimpin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen gagasan atau ide yang termuat dalam program kerja</li> </ul>	1. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 2. Masyarakat Pelaku UMKM Tenun

*Sumber data : di olah peneliti 2022*

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Menurut Moleong (2010 : 9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai pengumpulan data sebagai berikut :

#### 3.5.1. Wawancara

Wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi ini dilakukan dengan dua pertemuan, yaitu penanya (penanya) yang mengklarifikasi beberapa hal dan (penanya) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Strategi wawancara sangat tepat dalam menyelesaikan informasi yang diperoleh dari sumber atau saksi, yang dalam pemeriksaan subjektif terutama diselesaikan pada pertemuan atas ke bawah dengan mengklarifikasi beberapa hal. langsung kepada saksi. Dalam ulasan ini, para ahli menggunakan metode pengumpulan informasi dengan wawancara karena analisis perlu mengungkap data dari sumber secara dekat dan pribadi secara langsung, dari sini pintu terbuka untuk berbagai pertanyaan yang langsung terkait dengan proses pengujian terungkap.

### 3.5.2. Observasi

Aturan khusus untuk menyusun makalah logis dengan memperhatikan secara langsung objek penelitian dan kemudian merekam setiap efek samping yang dilacak di lapangan untuk menyelesaikan informasi yang diperlukan sebagai semacam perspektif yang terkait dengan masalah ilmuwan. Dalam tinjauan ini, memperhatikan faktor korespondensi, aset, sikap dan desain administrasi.

### 3.5.3. Dokumentasi

Strategi dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, catatan, buku, makalah, majalah, risalah, pertemuan, rencana, dll.. ( Arikunto, 2006 : 231 ).

### 3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2012:246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

#### 3.6.1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Informasi yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, sehingga harus dicatat secara cermat dan mendalam. Mengurangi informasi menyiratkan menyimpulkan, memilih hal-hal sentral, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, dan mencari subjek dan contoh. Selanjutnya informasi yang berkurang akan memberikan gambaran yang masuk akal, dan memudahkan para ahli untuk mendorong pemilihan informasi, dan mencari bila diperlukan. Pengurangan informasi dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti PC yang lebih kecil dari biasanya, dengan memberikan kode pada sudut pandang tertentu.

#### 3.6.2. Penyajian data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi. Dalam eksplorasi subyektif, pertunjukan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, diagram, koneksi antar kelas dan apa yang banyak digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam pemeriksaan subyektif adalah teks cerita. Dengan menunjukkan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, rencana kerja lebih lanjut mengingat apa yang telah dirasakan..

### 3.6.3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tujuan utama yang ditetapkan masih singkat, dan akan berubah jika ada area kekuatan utama untuk tidak, yang akan berisi pada tahap pengumpulan informasi berikutnya. Namun, dengan asumsi tujuan yang diangkat pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diprediksi ketika ilmuwan kembali ke bidang pengumpulan informasi, maka, pada saat itu, tujuan yang diajukan adalah tujuan yang dapat dipercaya.

